

Selasa, 17 April 2012

BERKAT
BERITAKHATULISTIWA

Pengelolaan Sektor Kehutanan Banyak Kelemahan

Pontianak, BERKAT.

Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kalimantan Barat, Adi Sudhyo, mengungkapkan banyak terdapat kelemahan terhadap pengelolaan sektor kehutanan di provinsi itu.

"Misalnya di bidang pengelolaan penerimaan bukan pajak, rekening pembangunan hutan daerah, dana bagi hasil SDA, kehutanan dan lingkungan tahun 2009-2011," katanya di Pontianak, Senin (16/4).

Ia mengatakan, pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Pusat secara tematik dengan mengambil sampel pemeriksaan

beberapa provinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia. Di Kalbar sendiri, ada lima entitas yang diperiksa yakni Provinsi Kalbar, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara.

"Hasilnya, kelemahan itu ditemukan diantaranya pemerintah belum melakukan inventarisasi potensi legakan pada 36 perusahaan perkebunan," ungkap Adi Sudhyo.

Selain itu, juga ditemukan, ketidapatuhan terhadap regulasi Kementerian Kehutanan, denda keterlambatan dan pembayaran provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi yang tidak dipungut.

BPK juga mencatat, empat pemerintah kabupaten yakni Kubu Raya, Sintang, Melawi dan Ketapang belum memiliki rekening pembangunan hutan sebagai alat kendali dana reboisasi.

"Kemudian ada juga penerimaan negara bukan pajak dari penggantian nilai legakan yang belum diterima kas negara Rp1,43 miliar," jelas Adi Sudhyo.

Ia mengatakan, ada sejumlah perusahaan juga tidak melakukan penatausahaan hasil hutan kayu sesuai ketentuan.

Adi Sudhyo mengatakan, untuk penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam-dana reboisasi tahun 2009 sampai 2011 di empat kabupaten belum di-

manfaatkan dan belum dilaporkan kepada Menteri Kehutanan dengan nilai Rp49,2 miliar.

"Pemberian Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan juga tidak mengakomodasi informasi kewajiban di kawasan hutan," katanya.

Ditambahkannya, pemeriksaan tersebut masih terbatas untuk penerimaan negara bukan pajak sektor kehutanan yang berasal dari pemanenan kayu dan dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan.

"Meski pemeriksannya masih terbatas, tetapi masih ditemukan adanya kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern," tambah Adi Sudhyo. (ria)